

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bushar Muhammad, 1983, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Pramita.

Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Jakarta, Margaretha Pustaka

Erna Sri Wibawanti, 2013, *Hak-hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm.

Edi Prajoto, 2006, *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional*, Bandung, CV. Utomo.

G.Kartasapoetra, A. Setiady, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, Bina Aksara.

Irwan Surajo, 2003, *Kapasitas Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola
Maria S.W. Sumardjono. 2008. *Tanah dalam Prspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta. Kompas,

Moh. Hatta, 2014, *Bab-bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta

Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara*, Jakarta, Citra Media

Mulyo Putro, 2002, *Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung, Fokusmedia.

Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung, Mandar Maju.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta, Liberty Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta, karunika universitas terbuka.

Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika

Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melaui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Rajawali Pers

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group.

Karya Ilmiah

Syarifah M, 2010, “Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Dalam Era Otonomi Daerah Pada Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, Tesis, Fakultas Hukum”, Universitas Gajah Mada.

Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Abritase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

R.I., Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

R.I., Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003, Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Internet

Dust Ningky, “Aspek Penyelesian Sengketa Sertifikat Ganda atas Tanah Pasca Kerusuhan di Kec. Sirimau Kota Ambon”,
<http://ppsgmmi.blogspot.com/2008/05/skripsi.html>.

Borneo News, “Surat Kesepakatan Hilang Sengketa LU2 Mengambang”,
<http://www.borneonews.co.id/berita/2071-surat-kesepakatan-hilang-sengketa-lu2-ngambang>.